

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, tidak terkecuali anak yang tengah berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi dalam anak sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan anak sebagai korban tindak pidana. Bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain penggunaan mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal tentang diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan bagaimana implementasi diversifikasi sebagai bentuk *restorative justice* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh bersumber dari wawancara yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden di lokasi penelitian dan data yang diperoleh dari beberapa sumber tertentu yang meliputi dokumen-dokumen, buku serta peraturan perundang-undangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya implementasi diversifikasi di Polres Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Data menunjukkan bahwa dari lima belas perkara yang ditangani Unit PPA Polres Semarang hanya ada satu perkara yang diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi. Begitu juga dengan Pengadilan Negeri Ungaran dari tiga puluh perkara anak yang ditangani hanya terdapat tiga perkara yang berhasil diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi. Faktor gagalnya diversifikasi didominasi oleh pihak korban yang tidak menghendaki adanya diversifikasi, selain itu terdapat faktor lainnya yaitu faktor undang-undang dan faktor masyarakat.

Simpulan penelitian ini adalah mekanisme diversifikasi belum diimplementasikan secara optimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran. Masih minimnya pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Kata Kunci: Diversifikasi, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation that must be protected, including children who are facing the law. Children who face the law in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are divided into children as perpetrators of criminal acts, children who are witnesses of criminal acts, and children as victims of criminal acts. Forms of protection for children who face the law include the use of diversion mechanisms in solving juvenile criminal cases. The formulation of the problem in this study is how the criminal policy on diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and how the implementation of diversion as a form of restorative justice in the jurisdiction of the Ungaran District Court.

Legal writing uses the method of empirical juridical approach. Research specifications in this writing use research specifications in a descriptive analytical manner. The data obtained were sourced from interviews obtained directly from the first source, namely respondents at the research location and data obtained from certain sources which include documents, books and laws and regulations. The data analysis method in this study uses qualitative analysis methods.

The results showed that the implementation of diversion in the jurisdiction of the Ungaran District Court has not run optimally. This is evidenced by the lack of implementation of diversion at the Semarang Police Station and Ungaran District Court. Data shows that of the fifteen cases handled by the Semarang Police PPA Unit, there was only one case that was resolved by a diversion mechanism. Likewise, with the Ungaran District Court, of the thirty child cases handled, only three cases were successfully resolved by the diversion mechanism. The factor of the failure of diversion is dominated by the victim who does not want diversion, apart from that there are other factors, namely legal factors and community factors.

The conclusion of this study is that the diversion mechanism has not been implemented optimally in the jurisdiction of the Ungaran District Court. The lack of diversion implementation in the jurisdiction of the Ungaran District Court is influenced by several factors.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System*